

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi (sistem perekonomian) serta sikap dari output itu sendiri (Irawan dan M. Suparmoko, 1992:5).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999:108).

Salah satu faktor yang menentukan karakteristik dan kecepatan pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia mempunyai sejumlah peranan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, dimana melalui jumlah sumber daya manusia yang besar dan produktif serta efisien akan dapat menjadi faktor

penentu keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah yang bersangkutan (Erna Setianingrum, 2008:2).

Masalah yang dihadapi ketenagakerjaan meliputi diantaranya yaitu pertambahan jumlah penduduk tiap tahun. Semakin meningkatnya jumlah penduduk tiap tahun, menyebabkan jumlah angkatan kerja juga meningkat. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut, jika tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai, tentunya akan menciptakan pengangguran. Masalah pengangguran tersebut merupakan masalah yang serius dalam bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran merupakan indikator penting dalam statistik tenaga kerja. Pengangguran telah lama dipandang sebagai penyebab utama kemiskinan. Oleh karena itu, jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah tiap tahunnya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan terutama penempatan tenaga kerja sebagai salah satu modal pembangunan.

Salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup penduduk yaitu memberi kesempatan kerja kepada penduduk yang merupakan angkatan kerja. Meningkatnya jumlah penduduk tiap tahun menyebabkan jumlah angkatan kerja juga meningkat. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai tentunya akan menciptakan pengangguran (Erna Setianingrum, 2008:4).

Tabel 1.1 Kesempatan Kerja Di Kabupaten Sragen Tahun 1993-2007

Tahun	Kesempatan Kerja (Orang)
1993	465.421
1994	432.975
1995	512.322
1996	418.235
1997	382.005
1998	382.808
1999	375.927
2000	299.973
2001	298.023
2002	366.780
2003	328.738
2004	265.941
2005	285.786
2006	307.912
2007	390.407

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Sragen

Berdasarkan data di atas, bisa dilihat bahwa kesempatan kerja di Kabupaten Sragen selama 15 tahun terakhir dari tahun 1993-2007 mengalami penurunan. Pada tahun 1993 kesempatan kerja sebanyak 465.421 orang, mengalami penurunan pada tahun 1994, kemudian bertambah menjadi 512.322 orang pada tahun 1995. Kesempatan kerja mengalami fluktuasi mulai tahun 1996 sampai dengan tahun 2007, naik hingga menjadi 390.407 orang pada tahun 2007.

Dari tabel di atas juga diketahui bahwa kesempatan kerja di Kabupaten Sragen secara rata – rata mengalami penurunan tiap tahunnya. Dengan adanya kenyataan bahwa kesempatan kerja di Kabupaten Sragen mengalami penurunan tiap tahunnya, maka perlu diketahui faktor-faktor apa yang menyebabkannya. Faktor-faktor inilah yang akhirnya mampu mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sragen. Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

mengenai faktor apa dan bagaimana faktor itu mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sragen. Adapun judul yang dipilih adalah :
“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Sragen Tahun 1993-2007”.

B. Perumusan Masalah

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ekspor daerah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sragen tahun 1993-2007?
2. Apakah investasi daerah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sragen tahun 1993-2007?
3. Apakah pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sragen tahun 1993-2007?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ekspor daerah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sragen tahun 1993-2007.
2. Untuk mengetahui investasi daerah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sragen tahun 1993-2007.
3. Untuk mengetahui pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sragen tahun 1993-2007.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran yang jelas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sragen dengan membandingkan antara teori yang diperoleh dengan kenyataan sebenarnya di lapangan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemda Kabupaten Sragen dalam membuat kebijakan menurunkan jumlah pengangguran di daerahnya.
3. Sebagai rujukan bagi para peneliti selanjutnya yang masih ingin melakukan penelitian mengenai masalah ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Permintaan

Simanjuntak mengatakan bahwa permintaan pengusaha atas tenaga kerja berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Seseorang membeli karena barang itu memberikan nikmat (*utility*) kepada orang itu. Akan tetapi pengusaha memperkerjakan seseorang karena orang tersebut dapat memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen (Erna Setianingrum, 2008:9).

Afrida mengatakan bahwa analisis permintaan tenaga kerja didasarkan atas asumsi bahwa permintaan pasar tenaga kerja diturunkan dari permintaan masyarakat atas barang dan jasa yang dibutuhkan. Tenaga kerja diminta karena kemampuannya memproduksi barang dan jasa. Dengan demikian analisis mengenai permintaan tenaga kerja didasarkan pada produktivitasnya (Erna Setianingrum, 2008:9).

$$D_{TK} \approx P_{turunan} \dots\dots\dots(i)$$

$$D_{TK} = f(Q_{TP}) \dots\dots\dots(ii)$$

$$D_{TK} = f(PDRB) \dots\dots\dots(iii)$$

$$PDRB = f(C, I, G, (X-M)) \dots\dots\dots(iv)$$

$$D_{TK} = f(C, I, G, (X - M)) \dots\dots\dots(v)$$

Dimana :

D_{TK} = permintaan tenaga kerja

Q_{TP} = kuantitas tingkat produksi

PDRB = produk domestik regional bruto

C = konsumsi

I = investasi

G = pengeluaran pemerintah

X-M = ekspor dan impor (Erna Setianingrum,
2008:9)

Arfida mengemukakan bahwa secara umum, permintaan akan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah tingkat produksinya (i). Semakin besar produksi yang dihasilkan maka semakin besar pula pendapatan yang diterima (ii). Tingkat pendapatan yang tinggi mencerminkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian tersebut berjumlah banyak. Pendapatan yang diterima di daerah dinamakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), jadi permintaan tenaga kerja secara langsung dipengaruhi oleh PDRB (iii). Sedangkan PDRB itu sendiri dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor-impor (iv). Oleh karena itu secara tidak langsung permintaan akan tenaga kerja juga bisa dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor-impor (v) (Erna Setianingrum, 2008:10).

B. Pengertian Tenaga Kerja

1. Konsep Tenaga Kerja / Penduduk Usia Kerja (PUK)

Suroto berstatemen bahwa pengertian tenaga kerja sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pengelompokkan penduduk usia kerja, karena kebanyakan pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batasan umur, jadi penduduk usia kerja dapat disebut sebagai tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja dikaitkan dengan asal katanya adalah tenaga yang berarti potensi atau kapasitas untuk menimbulkan gerak atau perubahan tempat suatu masa, dan kerja yang berarti banyaknya tenaga yang dikeluarkan dalam suatu kurun waktu untuk menghasilkan sesuatu. Dengan demikian tenaga kerja berarti kemampuan manusia untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain (Erna Setianingrum, 2008:11).

Pengertian penduduk usia kerja dari masing-masing negara berbeda-beda. India menggunakan batasan umur 14 sampai 60 tahun. Jadi penduduk yang termasuk usia kerja adalah mereka yang berusia 14 sampai 60 tahun, sedangkan mereka yang berumur di bawah 14 atau di atas 60 tahun tidak digolongkan sebagai penduduk usia kerja. Amerika Serikat pada awalnya menggunakan batasan umur minimum 14 tahun tanpa batas umur maksimum, kemudian sejak tahun 1967 batas umur minimum dinaikkan menjadi 16 tahun. Jadi penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 16 tahun keatas, sedangkan penduduk yang berusia di bawah 16 tahun tidak termasuk ke dalam

penduduk usia kerja. Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) menggolongkan penduduk yang termasuk usia kerja adalah penduduk yang usianya antara 15 sampai 64 tahun (Payaman Simanjuntak, 1985:2).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Indonesia mengelompokkan penduduk yang termasuk usia kerja adalah penduduk yang berumur minimal 15 sampai dengan 65 tahun.

2. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah sebagian dari jumlah penduduk dalam usia kerja yang mempunyai pekerjaan dan yang tidak mempunyai pekerjaan. Atau dengan kata lain angkatan kerja adalah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan tapi secara aktif atau pasif mencari suatu pekerjaan. Kata "mampu" di sini menunjuk pada 3 hal. Pertama mampu fisik, yaitu sudah cukup umur, jasmani sudah cukup kuat. Kedua, mampu mental, yaitu mempunyai mental sehat. Ketiga, secara yuridis cukup mampu dan tidak kehilangan. Kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan. Sedangkan kata "berada" berarti orang yang bersangkutan dapat secara aktif, maupun secara pasif mencari pekerjaan. Di sini tidak ada unsur paksaan dan adanya adalah kebebasan pribadi untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan keinginan (Suroto, 1983:12).

3. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak termasuk ke dalam usia kerja (10 tahun ke atas) atau penduduk usia kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari pekerjaan. Termasuk di dalamnya mereka yang kegiatannya bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya seperti mereka yang sudah pensiun, cacat jasmani, dan lain-lain (Erna Setianingrum, 2008:14).

4. Bekerja

Bekerja adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan, yang lamanya bekerja paling sedikit satu jam selama seminggu yang lalu secara kontinyu (Erna Setianingrum, 2008:11).

Sri Handono mengemukakan bahwa golongan orang yang bekerja dapat dibedakan menjadi (Erna Setianingrum, 2008:12) :

- a) Bekerja penuh adalah mereka yang benar-benar bekerja secara penuh paling sedikit satu jam selama satu minggu sebelum pencacahan.
- b) Setengah pengangguran adalah mereka yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja dilihat dari segi jam kerja, produktivitas kerja dan pendapatan.

Setengah penganggur ialah mereka yang mempunyai pekerjaan akan tetapi masih mempunyai waktu terluang dan masih mencari pekerjaan tambahan. Diakui bahwa istilah ini kurang tepat, setengah

pengangguran terdiri dari mereka yang bekerja kurang dari waktu yang biasanya berlaku bagi jenis pekerjaan tersebut. Juga digolongkan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang mempunyai pekerjaan yang kurang dari ketrampilan yang nyata-nyata atau potensial dimilikinya. Setengah penganggur ada yang kentara dan ada pula yang tidak kentara (Suroto, 1983:13).

5. Tingkat Pengangguran (*Unemployment rate*)

Tingkat pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengertian menganggur di sini adalah aktif mencari pekerjaan (Mulyadi. S, 2003:60).

6. Penganggur

Dalam pengertian makro ekonomis penganggur adalah sebagian dari angkatan kerja yang sedang tidak mempunyai pekerjaan. Dalam pengertian mikro penganggur adalah seorang yang mampu dan mau melakukan pekerjaan akan tetapi sedang tidak mempunyai pekerjaan (Suroto, 1983:12).

7. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)

Pengangguran terbuka atau pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan (Suroto, 1983:12).

8. Setengah Menganggur yang Kentara (*Visible Underemployment*)

Adalah jika seseorang bekerja tidak tetap (*part time*) diluar keinginannya sendiri, atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya (Suroto, 1983:12).

9. Setengah Menganggur yang Tidak Kentara (*Invisible Underemployment*)

Adalah jika seseorang bekerja secara penuh (*full time*) tetapi pekerjaannya itu dianggap tidak mencukupi, karena pendapatannya yang terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan ia untuk mengembangkan seluruh keahliannya (Mulyadi. S, 2003:61).

Simanjuntak berstatmen bahwa menurut sebab terjadinya, pengangguran dapat digolongkan menjadi tiga jenis pengangguran yaitu (Erna Setianingrum, 2008:13):

- a) Pengangguran Friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Pengangguran friksional dapat pula terjadi karena kurangnya mobilitas pencari kerja dimana lowongan pekerjaan justru terdapat bukan di sekitar tempat tinggal si pencari kerja.
- b) Pengangguran Struktural terjadi karena adanya perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan struktur tersebut memerlukan perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan baru tersebut.

- c) Pengangguran Musiman terjadi karena adanya pergantian musim atau fluktuasi kegiatan produksi. Misalnya di luar musim panen dan turun ke sawah banyak orang yang tidak melakukan kegiatan ekonomis, mereka hanya sekedar menunggu musim yang baru. Selama masa menunggu tersebut mereka digolongkan sebagai penganggur musiman.

C. Pengertian Ekspor

1. Ekspor

Ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditi yang kita miliki kepada bangsa lain atau negara asing, dengan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing, serta melakukan komunikasi dengan memakai bahasa asing. Sebaliknya, kegiatan impor adalah melakukan pembelian komoditi yang lebih berdaya guna dari negara lain, dengan bersedia membayar harganya dalam valuta asing (Amir MS, 2004:1).

2. Aneka Cara Ekspor

Dalam melaksanakan ekspor ke luar negeri dapat ditempuh beberapa cara antara lain sebagai berikut (Amir MS, 2005:49):

a) Ekpor Biasa

Dalam hal ini barang dikirim ke luar negeri sesuai dengan peraturan umum yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli luar negeri untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah diadakan dengan importir di luar negeri.

b) Barter

Yang dimaksud dengan barter adalah pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang di butuhkan dalam negeri.

c) Konsinyasi (*Consignment*)

Yang dimaksud dengan konsinyasi adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk di jual sedangkan hasil penjualannya diperlakukan sama dengan hasil ekspor biasa. Tegasnya di dalam hal pengiriman barang sebagai barang konsinyasi belum ada pembeli yang tertentu di luar negeri.

d) Package-Deal

Dalam rangka memperluas pasaran hasil bumi kita terutama dengan negara-negara sosialis, pemerintah ada kalanya mengadakan perjanjian perdagangan (*trade agreement*) dengan salah satu negara. Pada prinsipnya semacam barter, namun terdiri dari aneka komoditi.

e) Penyelundupan (*Smuggling*)

Setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari satu negara ke negara lain tanpa memehui ketentuan yang berlaku dapat dianggap sebagai usaha penyelundupan atau smuggling. Bahaya dari setiap penyelundupan terletak adanya pelarian dari kekayaan ke luar negeri (*assets flight*) tanpa mendapatkan suatu kompensasi. Hal ini berarti suatu pengurangan atas kekayaan negara dan masyarakat.

Ekspor suatu negara merupakan impor negara lain. Dengan harga dianggap tetap, ekspor tergantung dari pendapatan luar negeri bukan pendapatan nasional negara tersebut yang artinya ekspor tidak tergantung dari pendapatan nasional.

D. Investasi

1. Definisi Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sadono Sukirno, 1995:107).

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tapi juga investor asing. Demikian pula halnya Indonesia (Dumairy, 1997:132).

Untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan investasi, ada tiga macam cara yang dilakukan (Dumairy, 1997:136) :

- a) Dengan mengamati sumbangan dan perkembangan variabel I dalam identitas pendapatan nasional $Y = C + I + G (X-M)$. Data I merupakan data keseluruhan investasi domestik secara bruto, meliputi baik investasi swasta (PMA dan PMDN) maupun pemerintah.
- b) Dengan mengamati data-data PMDN dan PMA, dengan cara ini kita hanya mengamati investasi oleh kalangan dunia usaha swasta saja.
- c) Dengan menelaah perkembangan dana investasi yang disalurkan oleh dunia perbankan.

2. Macam – Macam Investasi

Sobri berstatement bahwa macam–macam investasi berdasarkan pelaku investasi dapat dibedakan sebagai berikut (Erna Setianingrum, 2008:22):

a) Investasi Pemerintah (*Public Investment*)

Public investment umumnya dilakukan tidak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (nasional), seperti jalan raya, rumah sakit, pelabuhan dan sebagainya.

Investasi – investasi seperti ini sering disebut dengan *social overhead capital* (SOC). Keuntungan bagi investasi – investasi ini baru terasa apabila muncul pertambahan permintaan dalam

masyarakat. Bertambahnya permintaan efektif, yang juga menaikkan pendapatan, akan memberikan keuntungan bagi publik investasi.

b) Investasi Swasta (*Private Investment*)

Private Investment adalah jenis investasi yang dilakukan oleh swasta dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan (laba), dan didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Apabila pendapatan bertambah, maka konsumsi juga akan bertambah dan pada akhirnya bertambah pula efektif demand. Investasi yang ditimbulkan oleh sebab bertambahnya permintaan yang bersumber investment mungkin dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

c) Investasi Pemerintah dan Swasta

Jenis investasi yang dilakukan oleh pihak publik dan swasta adalah investasi luar negeri (*foreign investment*). *Foreign investment* terjual dari selisih antara ekspor di atas impor (X-M). *Induced Investment* dalam hal (X-M) adalah disebabkan oleh dari penambahan permintaan di sebut *induced investment*. *Induced* perkembangan ekonomi di luar negeri.

3. Peran Investasi

Sukirno berstatemen bahwa di berbagai negara, terutama di negara industri yang perekonomiannya sudah sangat berkembang, investasi perusahaan adalah sangat volatile yaitu selalu mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat besar dan merupakan sumber penting dalam fluktuasi dalam kegiatan perekonomian. Di samping itu

perlu diingat kegiatan perekonomian dan kesempatan kerja meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi dalam perekonomian, yaitu (Erna Setianingrum, 2008:23):

- a) Investasi merupakan salah satu komponen agregat maka kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional, peningkatan ini akan selalu diikuti oleh penambahan dalam kesempatan kerja.
- b) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas produksi di masa depan dan perkembangan ini akan menstimular pertambahan produksi nasional dan kesempatan kerja.
- c) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi sehingga perkembangan teknologi akan memberikan sumbangan penting atas kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat.

E. Pengeluaran Pemerintah

Susanti mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak. Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menurut dua klasifikasi, yaitu (Erna Setianingrum, 2008:24):

1. *Pengeluaran Rutin Pemerintah*

Merupakan pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Yang termasuk dalam pengeluaran rutin antara lain belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga dan cicilan utang, dan lain-lain.

Anggaran belanja rutin memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.

2. *Pengeluaran Pembangunan*

Merupakan pengeluaran untuk pembangunan baik fisik seperti jalan, jembatan, gedung – gedung dan pembelian kendaraan, maupun pembangunan nonfisik spiritual seperti misalnya penataran, training, dan sebagainya.

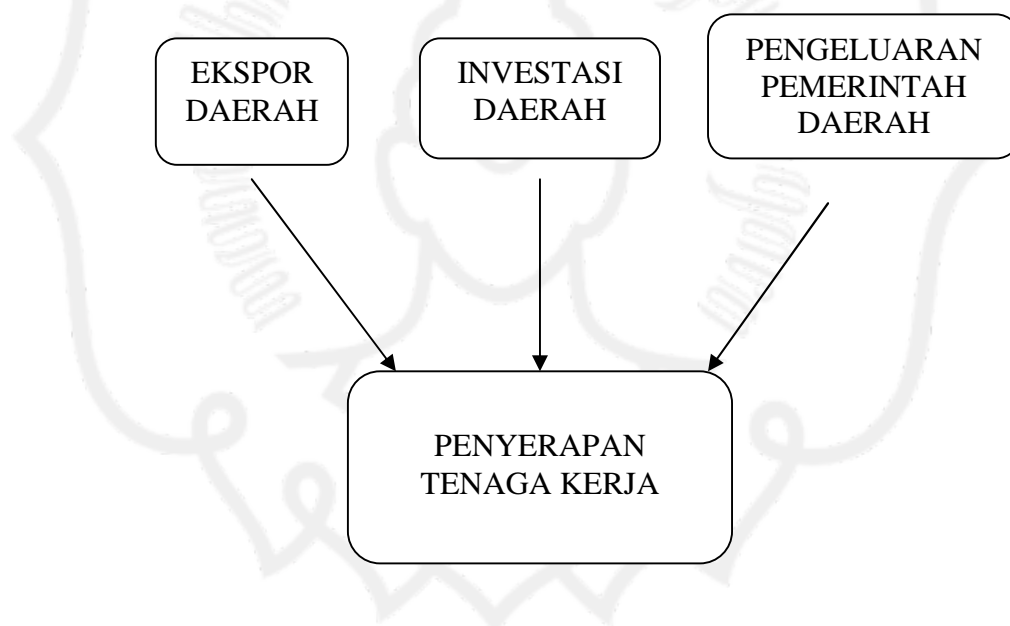
Selain membiayai pengeluaran sektoral melalui departemen atau lembaga, pengeluaran pembangunan juga membiayai proyek-proyek khusus daerah, yang dikenal sebagai proyek Inpres (Instruksi Presiden), baik yang dilaksanakan oleh pusat maupun masing-masing daerah. Besarnya alokasi anggaran untuk bantuan pembangunan daerah dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara serta beberapa faktor yang disesuaikan dengan masing-masing wilayah, dengan demikian proyek-proyek yang akan dibangun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah, sejalan dengan pembangunan di daerah lain.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Erna Setianingrum, 2008 dengan judul "Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Karanganyar Tahun 1991-2006 ". Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa dari ketiga variabel yang diteliti oleh Erna Setianingrum, yaitu variabel investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor, masing – masing memiliki pengaruh yang berbeda terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten Karanganyar. Dari segi variabel Investasi, investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten Karanganyar. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan menggunakan analisis regresi linier berganda, terdapat tambahan satu persen dalam penanaman modal sehingga dapat memperbanyak jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar 0,584%. Sedangkan dari segi variabel pengeluaran pemerintah dan variabel ekspor, keduanya tidak terbukti berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten Karanganyar. Semakin besar pengeluaran pemerintah maka akan semakin sedikit jumlah tenaga kerja yang terserap. Demikian juga dari sektor ekspor, banyak atau sedikitnya kegiatan ekspor yang dilakukan di kabupaten Karanganyar tidak mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang terserap di wilayah tersebut.

G. Kerangka Pemikiran

Penyerapan tenaga kerja dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah pembangunan ekonomi di suatu daerah sudah berjalan dengan baik atau belum. Semakin banyak suatu daerah mampu menyerap masyarakatnya untuk di berikan pekerjaan, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah tersebut sudah baik. Penyerapan tenaga kerja di suatu daerah dipengaruhi oleh ekspor, investasi, dan pengeluaran pemerintah.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

H. Hipotesis

1. Ekspor daerah diduga berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sragen.
2. Investasi daerah diduga berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sragen.
3. Pengeluaran pemerintah daerah diduga berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sragen.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian analisis kuantitatif yang meneliti mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dengan menggunakan data deret waktu (*time series*) antara tahun 1993 – 2007. Adapun yang diambil sebagai daerah penelitian adalah Kabupaten Sragen.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sragen yang berupa data tahunan yang mencakup tentang jumlah tenaga kerja, ekspor, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Analisis data dibuat secara *time series* dengan rentang waktu antara tahun 1993 – 2007.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel yang dipengaruhi dalam penelitian adalah penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sragen. Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terserap di Kabupaten Sragen yang dinyatakan dalam ribu orang.

2. Variabel Independen (X)

Variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah :

- a) Ekspor daerah (X_1), adalah nilai ekspor komoditi non migas yaitu tekstil dan produk tekstil serta furniture Kabupaten Sragen yang dinyatakan dalam milyar rupiah.
- b) Investasi daerah (X_2), yaitu nilai pembentukan modal tetap bruto yang terjadi di Sragen yang dinyatakan dalam milyar rupiah.
- c) Pengeluaran Pemerintah daerah (X_3), yaitu anggaran belanja pembangunan Kabupaten Sragen yang dinyatakan dalam milyar rupiah.

D. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dengan menggunakan model Cobb Douglass, karena pengaruh variabel bebas ekspor, investasi, pengeluaran pemerintah tidak langsung kepada penyerapan tenaga kerja:

Fungsi produksi persamaan :

$$E = \beta_0 I_i^{\beta_1} G_i^{\beta_2} X_i^{\beta_3}$$

Gujarati mengemukakan bahwa untuk memudahkan pendugaan terhadap persamaan, maka persamaan tersebut diubah menjadi bentuk regresi linier berganda dengan cara melogaritmakan persamaan tersebut, persamaan sebagai berikut (Erna Setianingrum, 2008:33) :

$$\text{Log } E = \beta_0 + \beta_1 \text{ log} I_i + \beta_2 \text{ log} G_i + \beta_3 \text{ log} X_i + \mu_i$$

Dimana :

E = jumlah tenaga kerja (orang)

β_0 = konstanta

β_{1-3} = koefisien regresi

I_i = investasi (juta rupiah)

G_i = pengeluaran pemerintah (milyar rupiah)

X_i = ekspor (ribu dollar)

μ_i = variabel pengganggu, wakil semua pengaruh yang timbul dari variabel terkait akibat kesalahan peneliti, tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan karena diasumsi sama dengan rupiah.

Selanjutnya untuk menganalisis model tersebut dilakukan pengujian sebagai berikut :

1. Uji Statistik

a) Uji t

Uji t merupakan uji secara individual dari semua koefisien regresi untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh variabel independent (X_1, X_2, X_3) terhadap variabel dependen (Y) (Gujarati, 1997 : 79).

Langkah Pengujian :

1) t_{hitung}

$$T_{hitung} = \frac{\beta_1}{Se(\beta_1)}$$

Dimana :

β_1 = koefisien regresi

Se = tingkat kesalahan

2) Hipotesis

Dengan derajat kebebasan (n;k-1) dan taraf signifikansi 5%, maka :

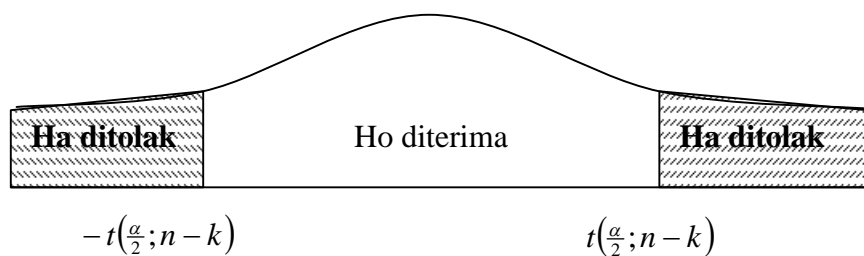
$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, artinya paling tidak salah satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3) Kriteria Pengujian

a. Jika $-t_{tabel} < t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa signifikansi atau variabel independen yang diuji secara nyata berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$, atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang berarti bahwa signifikansi atau variabel independen yang diuji secara nyata tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.1 Daerah terima dan daerah tolak uji t

b) Uji F

Uji F merupakan uji secara bersama – sama dari semua koefisien regresi untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Modul Laboratorium Statistik Ekonomi, 2001 : 49).

Langkah Pengujian :

1) F hitung

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2 / k - 1}{-R^2 / n - k}$$

Dimana :

R^2 = koefisien determinasi

n = jumlah data atau sampel

k = banyaknya variabel bebas

Karena pengolahan data dilakukan dengan bantuan program Eviews maka uji F dilakukan dengan membandingkan antara nilai F statistik yang diperoleh dari hasil regresi linear berganda pada printout Eviews dengan nilai F kritis yang diperoleh dari tabel nilai F.

2) Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 dengan derajat kebebasan (df) pembilang (k-1) dan penyebut (n-k), $Df = k-1; n-k$

3) Hipotesis

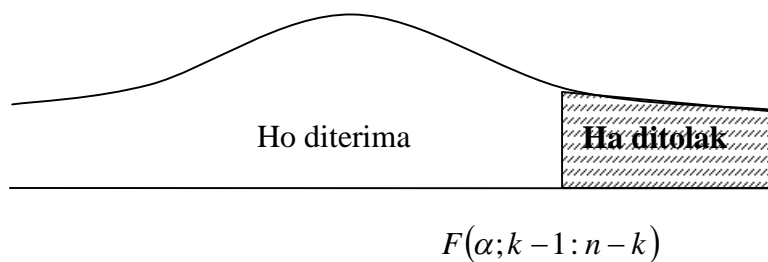
$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya secara bersama – sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, artinya secara bersama – sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

4) Kriteria Pengujian

a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti signifikansi atau variabel independen secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

b) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Berarti signifikansi variabel independen secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2 Daerah terima dan daerah tolak uji F

c) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengukur kebaikan dari model regresi maka diperlukan perhitungan determinasi (R^2), yaitu angka untuk persentase total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan variabel independen dalam model.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik, maka dilakukan pengujian terhadap gejala multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

a) Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah pada model ditemukan korelasi atau variabel independen. Jika terjadi kolinearitas maka terdapat masalah multikolinearitas. Metode yang digunakan adalah metode Klein. Menurut L.R Klein, masalah multikolinearitas menjadi masalah apabila derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antara variabel secara bersama – sama. Langkah yang dilakukan adalah semua variabel independen di regres secara berpasangan, kemudian r^2 hasil regresi tersebut dibandingkan dengan R^2 awal. Jika $R^2 > r^2$ maka tidak terjadi masalah multikolinearitas, dan jika sebaliknya $R^2 < r^2$ maka terjadi masalah multikolinearitas (Damodar Gujarati, 1997 : 159).

b) Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah kesalahan pengganggu variabel mempunyai varian yang sama atau tidak. Metode yang digunakan adalah uji LM ARCH. Ide dasar dari uji ini adalah anggaphlah akan meregres model regresi linear berganda semua variabel bebas dengan residual kuadrat dari persamaan regresi sebelumnya. Kemudian dari hasil regresi tersebut akan diperoleh t hitung dan nilai probabilitasnya, jika $-t$ tabel $< \pm t$ hitung $< +t$ tabel maka variabel tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas dan sebaliknya.

c) Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi karena adanya korelasi antara variabel gangguan sehingga penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar. Metode yang digunakan adalah dengan percobaan Durbin-Watson (ditest), dimana langkah – langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan regresi seperti biasa untuk meperoleh nilai residual e_1 dan d .
2. Mencari nilai kritis d_L dan d_U .
3. Membandingkan nilai Durbin-Watson yang sudah diperoleh dengan nilai teoritis dengan menggunakan derajat kebebasan $(n;k-1)$, dimana k merupakan jumlah variabel bebas termasuk variabel konstanta.

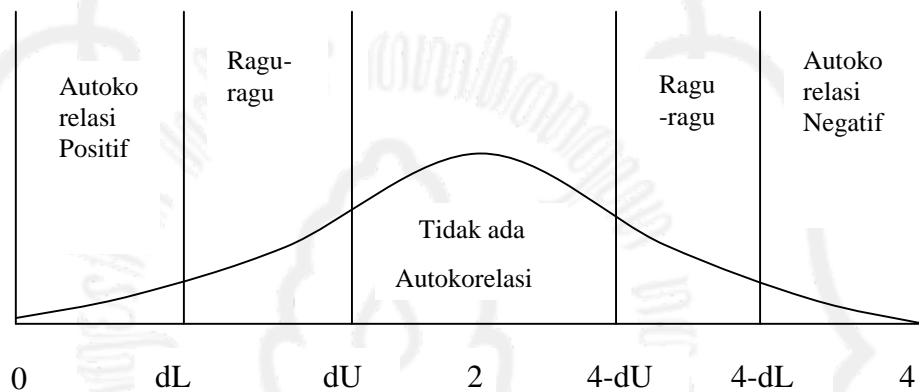
Hipotesis yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi adalah :

$-d - d_U$: tidak ada autokorelasi positif

$-d < 4 - d_U$: tidak ada autokorelasi negatif

$-d_U < d < 4 - d_U$: tidak ada autokorelasi positif dan negatif

Dimana : d_U batas lebih tinggi dan d_L batas lebih rendah.



Gambar 3.3 Autokorelasi

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Keadaan Geografis

a. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Sragen sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, letaknya di bagian Tenggara ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, terletak diantara $110^{\circ} 45'$ dan $111^{\circ} 10'$ Bujur Timur serta $7^{\circ} 15'$ dan $7^{\circ} 30'$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah $941,55 \text{ Km}^2$ atau 94.155 Ha. Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 47 Km (Kec.Kalijambe – Kec.Sambirejo) dan dari Utara ke Selatan adalah 38 Km (Kec.Sukodono – Kec.Kedawung).

Batas :

- 1) Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Grobogan (Purwodadi).
- 2) Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur.
- 3) Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar.
- 4) Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali.

b. Topografi

1) Kemiringan Lahan

Wilayah Kabupaten Sragen mempunyai kemiringan lahan terbesar pada 0 – 2% (datar) seluas 49.551 Ha (di wilayah Kecamatan Sambungmacan, Gondang, Ngrampal, Sragen, Karangmalang, Sidoharjo, Masaran, Tanon, Plupuh, dan sebagian Gemolong, Kalijambe). 2 – 15% (bergelombang) seluas 40.769 Ha. 15,01 – 40% (Curam) seluas 3.519 Ha (di wilayah Kecamatan Jenar, Tangen, sebagian wilayah Kecamatan Gesi, Sukodono, Mondokan, Sumberlawang, Miri, Sambirejo, dan Kedawung). >40% (sangat curam) seluas 316 Ha di wilayah Kecamatan Sambirejo.

2) Ketinggian

Wilayah Kabupaten Sragen mempunyai ketinggian rata – rata 109m diatas permukaan air laut dengan standar deviasi 50m.

c. Penggunaan Lahan

1) Wilayah Hutan

Wilayah hutan di Kabupaten Sragen seluas 5550 Ha terdiri dari hutan lindung, hutan suaka alam dan wisata, hutan produksi tetap. Sedangkan hutan produksi terbatas dan hutan yang dapat dikonversi tidak ada.

2) Lahan Persawahan

Lahan persawahan Kabupaten Sragen seluas 39.769,15 Ha terdiri dari sawah teririgasi seluas 25.315,15 Ha dan sawah tadah hujan seluas 14.454,00 Ha. Sedangkan sawah pasang surut dan sawah lainnya tidak ada.

3) Lahan Kering

Lahan kering Kabupaten Sragen seluas 48.770,36 Ha terdiri dari ladang (tegalan) seluas 18.576,00 Ha, perkebunan seluas 866,00 Ha, pemukiman 22.423,95 Ha, dan lahan belum/tidak diusahakan kosong.

d. Keadaan Iklim

1) Suhu Udara

Menurut stasiun Klimatologi Klas I Semarang suhu udara di Kabupaten Sragen berkisar antara 24°C (suhu terendah) sampai dengan 29°C (suhu tertinggi), tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan gunung Lawu mempunyai suhu udara rata-rata relatif rendah dibandingkan dengan wilayah di utara Bengawan Solo.

2) Kelembaban Udara

Kelambaban udara rata-rata bervariasi dari 75 persen (kelembaban udara terendah) sampai dengan 92 persen (kelembaban udara tertinggi).

3) Curah Hujan

Curah hujan rata-rata dibawah 3.000 mm per tahun dan hari hujan rata-rata di bawah 150 hari per tahun, untuk tahun 2007 hari hujannya pendek tetapi curah hujannya tinggi, karena ada perubahan musim dan pemanasan global (musim hujannya mundur).

4) Kecepatan angin

Kecepatan angin di Kabupaten Sragen terendah 20 knot dan kecepatan angin tertinggi 25 knot.

2. Wilayah Pemerintahan

Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sragen pada tahun 2007 terbagi menjadi 20 Kecamatan, 196 Desa, 12 Kelurahan, 2.492 Dukuh, 123 Rukun Warga (terdapat hanya pada kelurahan) dan 5.365 Rukun Tangga. Mulai tahun 2004 ada perubahan jumlah desa yang semula 200 desa menjadi 196 desa sedangkan kelurahan yang semula 8 kelurahan menjadi 12 kelurahan, perubahan terjadi di wilayah Kecamatan Gemolong.

3. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Sragen tahun 2007 sebanyak 867.572 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 428.876 jiwa dan perempuan 438.696 jiwa.

**Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Sragen
Tahun 2007**

No	Kecamatan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Kalijambe	23.204	22.953	46.157
2	Plupuh	22.746	23.407	46.153
3	Masaran	32.385	32.519	64.904
4	Kedawung	28.748	29.485	58.233
5	Sambirejo	18.444	18.572	37.016
6	Gondang	21.167	21.662	42.829
7	Sambungmacan	21.528	22.282	43.810
8	Ngrampal	18.205	18.327	36.532
9	Karangmalang	28.629	29.037	57.666
10	Sragen	31.930	33.368	65.298
11	Sidoharjo	25.159	25.917	51.076
12	Tanon	27.018	27.650	54.668
13	Gemolong	22.334	22.880	45.214
14	Miri	15.891	16.460	32.351
15	Sumberlawang	22.172	23.020	45.192
16	Mondokan	16.848	17.259	34.107
17	Sukodono	15.310	15.865	31.175
18	Gesi	10.630	11.003	21.633
19	Tangen	13.307	13.588	26.895
20	Jenar	13.221	13.442	26.663
	Jumlah	428.876	438.696	867.572

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Sragen

Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah kecamatan Sragen, yaitu 65.298 jiwa (7,53%), kemudian kecamatan Masaran yaitu 64.904 jiwa (7,48%), dan kecamatan Kedawung yaitu 58.233 jiwa (6,71%). Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Gesi yaitu 21.633 jiwa (2,49%), kemudian kecamatan Jenar yaitu 26.663 jiwa (3,07%), dan kecamatan Tangen yaitu 26.895 jiwa (3,10%).

4. Tenaga Kerja

Pada tahun 2006, penduduk Kabupaten Sragen bermata pencaharian di sektor pertanian sebanyak 337.536 orang (53,92%).

Kemudian diketahui sebanyak 20,91% pekerja bekerja di sektor jasa kemasyarakatan, dan sebanyak 13,68% pekerja bekerja di sektor perdagangan. Menyadari potensi masyarakatnya, pemerintah Kabupaten Sragen serius mengembangkan dan memasarkan padi organik. Melalui pengembangan padi organik diharapkan para petani di Kabupaten Sragen terbuka wawasannya untuk menanam dan mengembangkan produk-produk pertanian yang lebih memiliki nilai jual tinggi.

5. Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah yang biasanya terjadi dalam sebuah daerah yang harus segera diselesaikan, dan pemerintah sebaiknya bertindak cepat untuk menanganinya. Pengangguran tercipta karena tidak adanya keseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang bertambah dengan pertumbuhan lapangan kerja. Lebih tepatnya adalah bahwa pertumbuhan tenaga kerja lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja, keadaan yang demikian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah angka kelahiran yang terus bertambah atau banyaknya tenaga kerja yang tidak siap pakai. Sedangkan pemerintah masih lamban dalam menyediakan lapangan kerja untuk penduduk.

Tingkat pengangguran merupakan indikator penting dalam statistik tenaga kerja, karena mencerminkan baik atau tidaknya perekonomian suatu daerah. Tingkat pengangguran adalah perbandingan jumlah

pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen (%), dirumuskan sebagai berikut :

$$IP = \frac{\text{pencari kerja}}{\text{angkatan kerja}} \times 100$$

Semakin tinggi tingkat pengangguran yang terdapat di suatu daerah, menunjukkan semakin buruk perekonomian daerah tersebut.

**Tabel 4.2. Indeks Pengangguran Kabupaten Sragen
Tahun 1993 – 2007**

Tahun	Pencari kerja (Orang)	Angkatan kerja (Orang)	Indek Pengangguran (Persen)
1993	9.966	483.411	1,97
1994	10.321	495.264	2,04
1995	10.756	503.220	2,12
1996	11.223	506.205	2,21
1997	11.781	509.341	2,31
1998	11.205	510.411	2,20
1999	10.525	501.236	2,10
2000	9.653	399.965	2,41
2001	9.214	397.365	2,32
2002	10.325	489.041	2,11
2003	9.563	438.318	2,18
2004	8.945	354.589	2,52
2005	8.665	381.049	2,27
2006	7.132	41.055	1,74
2007	6.746	520.543	1,30

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Sragen

Dari tabel di atas, dapat diketahui perkembangan tingkat pengangguran di Kabupaten Sragen selama 15 tahun terakhir. Pertumbuhan tingkat pengangguran di Kabupaten Sragen tiap tahunnya dapat dikatakan mengalami penurunan. Hanya berkisar antara 2% hingga pada tahun 2007 tingkat pengangguran di Kabupaten Sragen hanya sebesar 1,3%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Sragen berjalan dengan baik, hal ini

bisa dilihat dari semakin menurunnya tingkat pengangguran yang terjadi di Kabupaten Sragen.

B. Analisis Deskripsi Variabel Penelitian

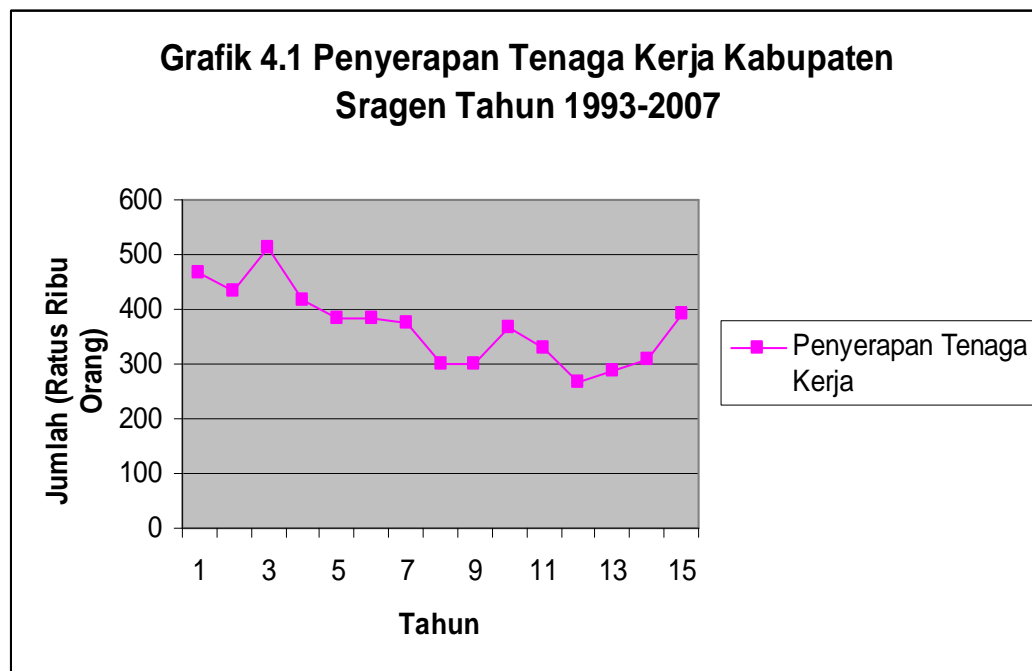
1. Variabel Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah kesempatan yang tersedia bagi tenaga kerja sebagai faktor produksi untuk melakukan proses produksi. Adanya kesempatan kerja ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

**Tabel 4.3. Kesempatan Kerja Kabupaten Sragen
Tahun 1993 – 2007**

Tahun	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)
1993	465.421
1994	432.975
1995	512.322
1996	418.235
1997	382.005
1998	382.808
1999	375.927
2000	299.973
2001	298.023
2002	366.780
2003	328.738
2004	265.941
2005	285.786
2006	307.912
2007	390.407

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Sragen



Sumber: Data Diolah

2. Ekspor Kabupaten Sragen

Ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditi yang kita miliki kepada bangsa lain atau negara asing, dengan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing, dan bertujuan untuk menambah pendapatan daerah pangekspor. Berikut adalah tabel perkembangan ekspor Kabupaten Sragen :

Tabel 4.4 Ekspor Kabupaten Sragen Tahun 1993 – 2007

Tahun	Ekspor (Rupiah)
1993	10.575.497.000
1994	10.207.209.000
1995	11.395.110.000
1996	9.685.682.000
1997	10.089.253.000
1998	10.848.660.000
1999	11.541.128.000
2000	12.238.766.000
2001	14.759.553.000
2002	15.645.126.000
2003	13.476.700.000
2004	17.820.461.000
2005	17.820.461.000
2006	20.255.800.000
2007	21.065.000.000

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Sragen, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan ekspor di Kabupaten Sragen mengalami penurunan dan kenaikan. Tahun 1993 – 1994 mengalami penurunan, pada tahun 1995 mengalami kenaikan namun ditahun berikutnya mengalami penurunan kembali. Pada tahun 1997 – 2002 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2003 mengalami sedikit penurunan. Kemudian pada tahun 2004 – 2007 mengalami kenaikan secara terus menerus. Hal ini dikarenakan konsumen internasional mulai mengakui kualitas produk-produk ekspor yang berasal dari Indonesia khususnya dari Kabupaten Sragen, sehingga para importir-importir tersebut menaikkan jumlah pembelian mereka atas barang-barang ekspor dari Kabupaten Sragen.

3. Investasi Kabupaten Sragen

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki oleh suatu daerah dan biasanya berjangka waktu lama, dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

Tabel 4.5 Investasi Kabupaten Sragen Tahun 1993 – 2007

Tahun	Investasi (Rupiah)
1993	152.784.000.000
1994	235.642.000.000
1995	219.856.000.000
1996	195.723.000.000
1997	242.150.000.000
1998	209.875.000.000
1999	198.987.000.000
2000	137.764.000.000
2001	140.870.000.000
2002	357.004.000.000
2003	471.123.000.000
2004	194.478.000.000
2005	195.589.000.000
2006	246.007.000.000
2007	354.255.000.000

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Sragen, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui besarnya nilai investasi di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 1993 – 1994 mengalami kenaikan jumlah investasi, pada tahun 1995 – 1996 mengalami penurunan, tahun berikutnya mengalami kenaikan jumlah investasi. Pada tahun 1997 – 2000 mengalami penurunan jumlah investasi, namun pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2001 – 2003 mengalami kenaikan jumlah investasi. Kemudian pada tahun 2004 mengalami penurunan secara drastis, hingga pada tahun berikutnya investasi di kabupaten Sragen mengalami kenaikan sampai tahun 2007.

4. Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sragen

Pengeluaran pemerintah dimaksudkan untuk mengalokasikan anggaran dari pendapatan daerah untuk membiayai operasional daerah, juga untuk membiayai proyek-proyek khusus daerah, daerah yang dimaksudkan adalah Kabupaten Sragen.

**Tabel 4.6 Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sragen
Tahun 1993 – 2007**

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Rupiah)
1993	68.795.435.000
1994	85.145.275.000
1995	97.475.325.000
1996	101.250.750.000
1997	48.206.626.300
1998	79.976.274.600
1999	113.343.289.335
2000	103.789.692.000
2001	277.137.115.000
2002	315.655.144.000
2003	110.124.631.000
2004	353.227.995.000
2005	413.730.246.000
2006	706.989.822.000
2007	998.641.646.000

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Sragen, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah Kabupaten Sragen mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 1993 – 1996 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 1997 mengalami penurunan. Pada tahun 1998 – 1999 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2000 mengalami sedikit penurunan. Kemudian pada tahun 2001 – 2002 mengalami kenaikan lagi. Pada tahun 2003 mengalami penurunan, namun tahun selanjutnya yaitu tahun 2004 – 2007 mengalami kenaikan terus menerus.

Tabel berikut merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4.7 Penyerapan Tenaga Kerja, Ekspor, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah Tahun 1993 – 2007

Tahun	Penyerapan Tenaga Kerja (E)	Ekspor (X)	Investasi (I)	Pengeluaran Pemerintah (G)
1993	465.421	10.575.497.000	152.784.000.000	68.795.435.000
1994	432.975	10.207.209.000	235.642.000.000	85.145.275.000
1995	512.322	11.395.110.000	219.856.000.000	97.475.325.000
1996	418.235	9.685.682.000	195.723.000.000	101.250.750.000
1997	382.005	10.089.253.000	242.150.000.000	48.206.626.300
1998	382.808	10.848.660.000	209.875.000.000	79.976.274.600
1999	375.927	11.541.128.000	198.987.000.000	113.343.289.335
2000	299.973	12.238.766.000	137.764.000.000	103.789.692.000
2001	298.023	14.759.553.000	140.870.000.000	277.137.115.000
2002	366.780	15.645.126.000	357.004.000.000	315.655.144.000
2003	328.738	13.476.700.000	471.123.000.000	110.124.631.000
2004	265.941	17.820.461.000	194.478.000.000	353.227.995.000
2005	285.786	17.820.461.000	195.589.000.000	413.730.246.000
2006	307.912	20.255.800.000	246.007.000.000	706.989.822.000
2007	390.407	21.065.000.000	354.255.000.000	998.641.646.000

Keterangan : a. Penyerapan Tenaga Kerja dalam ribu orang

b. Ekspor dalam milyar rupiah

c. Investasi dalam milyar rupiah

d. Pengeluaran Pemerintah dalam milyar rupiah

C. Analisis Kuantitatif

1. Hasil Estimasi

Hasil analisis data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh ekspor, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja.

Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi

Dependent Variable: LOG(E)

Method: Least Squares

Date: 01/04/10 Time: 22:36

Sample: 1993 2007

Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.064681	0.769383	9.182268	0.0000
LOG(X)	-1.379138	0.524100	-2.631441	0.0233
LOG(I)	0.195593	0.114579	1.707052	0.1158
LOG(G)	0.261840	0.150056	1.744942	0.1088
R-squared	0.574654	Mean dependent var		5.889826
Adjusted R-squared	0.458650	S.D. dependent var		0.190779
S.E. of regression	0.140369	Akaike info criterion		-0.865913
Sum squared resid	0.216737	Schwarz criterion		-0.677099
Log likelihood	10.49435	F-statistic		4.953757
Durbin-Watson stat	1.770292	Prob(F-statistic)		0.020482

Sumber : Hasil pengolahan komputer, Eviews 3.0

a. Persamaan Regresi Linier Berganda

Hasil pengolahan data untuk regresi linier berganda dengan menggunakan program Eviews 3.0 dapat dilihat pada tabel 4.8 diatas. Dari tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$\text{Log}E = 7,065 - 1,379 \text{Log}X + 0,196 \text{Log}I + 0,262 \text{Log}G$$

Adapun fungsi Cobb Douglass dari persamaan regresi linier berganda tersebut adalah sebagai berikut :

$$E = 7,065 X^{-1,379} I^{0,196} G^{0,262}$$

b. Uji Teori

Uji teori digunakan untuk menguji apakah hasil penelitian terhadap variabel – variabel bebas sesuai dengan landasan teori yang dipergunakan.

1) Ekspor

Variabel ekspor pada persamaan regresi di atas menunjukkan koefisien regresi dengan nilai -1,379. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ekspor mempunyai pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil ini tidak dapat membuktikan hipotesis yang telah disusun berdasarkan teori terdahulu yang menyatakan bahwa ekspor berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Seharusnya ekspor berpengaruh positif, karena semakin besar ekspor atau penjualan produk industri ke luar negeri maka akan menyerap tenaga kerja lebih banyak untuk memproduksi barang – barang yang akan di ekspor.

Berikut ini merupakan tabel mengenai bukti bahwa ekspor komoditi meubel atau furniture memberikan sumbangan yang lebih besar bagi pendapatan daerah dibandingkan komoditi tekstil dan produk tekstil yang terdapat di Kabupaten Sragen:

Tabel 4.9 Realisasi Nilai Ekspor Komoditi Kabupaten Sragen Tahun 1993 – 2007

Tahun	Jenis Komoditi	
	Tekstil dan Produk Tekstil (Rupiah)	Meubel, Furniture (Rupiah)
1993	976.358.000	9.599.139.000
1994	1.097.521.000	9.109.688.000
1995	1.632.159.000	9.762.951.000
1996	1.985.224.000	7.700.458.000
1997	2.322.157.000	7.767.096.000
1998	2.653.894.000	8.194.766.000
1999	3.080.413.000	8.460.715.000
2000	3.791.277.000	8.447.489.000
2001	936.000.000	13.823.553.000
2002	4.796.483.000	10.848.643.000
2003	2.151.200.000	11.325.500.000
2004	1.865.500.000	15.954.961.000
2005	1.865.500.000	15.954.961.000
2006	3.805.800.000	16.450.000.000
2007	4.105.000.000	16.960.000.000

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Sragen

Hal ini bisa terjadi dikarenakan perusahaan – perusahaan furniture di Kabupaten Sragen yang mengekspor produknya ke luar negeri, sebagian besar menggunakan padat modal, yakni perusahaan – perusahaan tersebut lebih banyak menggunakan peralatan mesin modern untuk memproduksi barang/furniture. Sehingga tidak memerlukan tenaga manusia yang banyak. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi ekspor, maka belum tentu kesempatan kerja juga ikut naik. Karena sebanyak apapun permintaan konsumen terhadap barang – barang ekspor tidak mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

2) Investasi

Hipotesis yang telah disusun berdasarkan teori – teori terdahulu menyatakan bahwa investasi mempunyai pengaruh

positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Dari persamaan regresi di atas, variabel investasi memiliki nilai koefisien 0,196, yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif antara investasi dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan teori terdahulu, sehingga hipotesis yang disusun oleh peneliti berdasarkan teori tersebut terbukti. Penelitian ini menemukan bahwa investasi mempunyai pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggi nilai investasi maka semakin banyak pula tenaga kerja yang terserap.

3) Pengeluaran Pemerintah

Dari hasil persamaan regresi diperoleh variabel pengeluaran pemerintah dengan nilai koefisien 0,262, terdapat pengaruh positif antara pengeluaran pemerintah dengan penyerapan tenaga kerja. Sehingga hipotesis yang telah disusun yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja terbukti. Karena semakin besar pengeluaran pemerintah maka akan menambah kegiatan produksi sehingga membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak.

c. Uji Statistik

Uji statistik dalam penelitian ini meliputi uji hipotesis secara individual yaitu terhadap masing – masing variabel independen, uji hipotesis terhadap variabel independen secara

bersama – sama dan koefisien determinasi. Berikut ini akan diuraikan masing – masing uji statistik tersebut.

1) Uji t

Yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pengaruh dari masing – masing variabel bebas secara individu atau secara terpisah terhadap variabel terikat dengan langkah – langkah pengujian sebagai berikut:

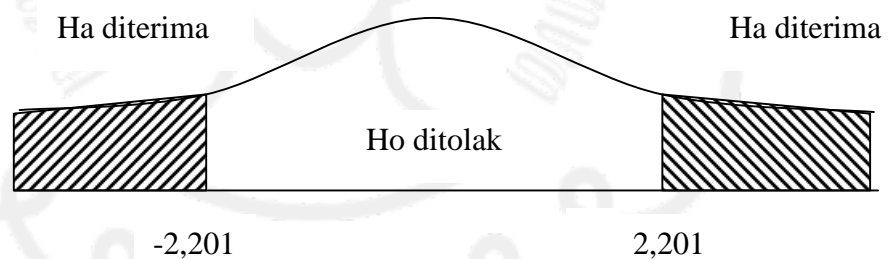
a) $\alpha : 0,05; \frac{\alpha}{2} : 0,025$

df : 11

b) Perhitungan uji t :

Nilai t tabel : $t\left(\frac{\alpha}{2}; n - k\right)$

c) Daerah penguji



Gambar 4.1 Daerah Terima dan Daerah Tolak Uji t

Hasil uji dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4.10 Hasil Uji t

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Prob	Keterangan
Ekspor	-2,63	2,201	0,0233	Signifikan
Investasi	1,71	2,201	0,1157	Tidak Signifikan
Pengeluaran Pemerintah	1,75	2,201	0,1086	Tidak Signifikan

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa:

- a) Untuk Ekspor probabilitas nilai t 0,0233 lebih kecil dari probabilitas signifikansi 0,05 maka H_o ditolak dan H_a diterima. Ini berarti bahwa secara individu ekspor berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.
- b) Untuk investasi : $t_{hitung} < t_{tabel} = 1,71 < 2,201$, maka H_o diterima dan H_a ditolak. Ini berarti bahwa secara individu investasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.
- c) Untuk pengeluaran pemerintah : $t_{hitung} < t_{tabel} = 1,75 < 2,201$, maka H_o diterima dan H_a ditolak. Ini berarti bahwa secara individu pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

2) Uji F

Uji F adalah uji statistik untuk menguji pengaruh ekspor, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap jumlah tenaga kerja secara bersama-sama. Adapun langkah-langkah pengujian sebagai berikut :

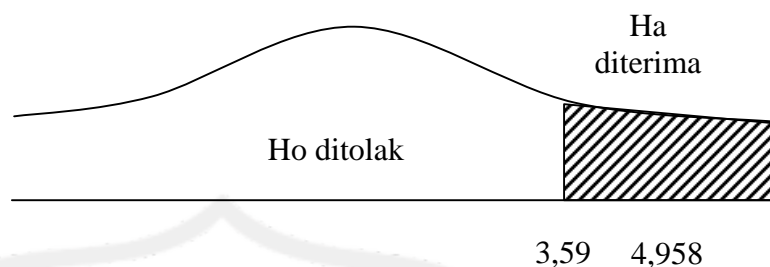
- a) $\alpha : 0,05$

df : 11

b) Perhitungan uji F

Nilai F_{tabel} : 3,59

Nilai F_{hitung} : 4,958



Gambar 4.2 Daerah Terima dan Daerah Tolak Uji F

Tabel 4.11 Hasil Uji F

Variabel	F_{hitung}	F_{tabel}	Prob	Keterangan
Ekspor, Investasi, Pengeluaran Pemerintah	4,958	3,59	0,020430	Signifikan

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan pengolahan data, diperoleh hasil $F_{hitung} = 4,958$ sedangkan F_{tabel} pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 3,59. dikarenakan $F_{hitung} > F_{tabel} = 4,958 > 3,59$ maka H_o ditolak dan H_a diterima, berarti variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga ekspor, investasi, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

3) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi diartikan sebagai seberapa besar variabel-variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen, atau seberapa besara variasi variabel-variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen.

Berdasarkan tabel 4.8 besarnya R^2 adalah 0.574654 sehingga dapat diartikan bahwa sekitar 57% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independent, sedangkan sisanya sebesar 43% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

d. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas muncul apabila adanya hubungan linear diantara variabel independen yang digunakan dalam model. Konsekuensi dari adanya dari adanya multikolinearitas adalah koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir dan nilai-nilai regresinya menjadi tidak terhingga. Pengujian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode Klein, yaitu dengan membandingkan nilai r^2 dengan nilai Adjusted R^2 yang diperoleh dari hasil pengujian korelasi.

Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	r^2	R^2	Keterangan
X terhadap I	0,29	0,57	Bebas Multikolinearitas
X terhadap G	0,35	0,57	Bebas Multikolinearitas
I terhadap G	0,01	0,57	Bebas Multikolinearitas

Sumber : Data diolah

Dari hasil tabel di atas, diketahui bahwa semua regresi antar variabel independen memiliki nilai r^2 yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai R^2 . Dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel independen memberikan pengaruh bebas dari masalah multikolinearitas.

2) Uji Heteroskedastisitas

Model regresi linier klasik memiliki satu asumsi yang paling penting, yaitu varian residual bersifat homoskedastik atau bersifat konstan. Asumsi ini tidak selalu realistis, karena sering terjadi pelanggaran asumsi klasik yang disebabkan oleh varian residual tidak lagi bersifat konstan atau disebut terjadi masalah heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan mutual dalam fungsi regresi yang mempunyai varian yang tidak sama, sehingga penaksiran OLS (Ordinary Least Square) tidak efisien, varian estimator tidak lagi minimum, kendatipun estimator itu sendiri tidak bias.

Pada penelitian ini akan menggunakan uji LM ARCH yaitu membandingkan nilai $OBS \cdot R^2$ dengan χ^2 tabel dengan df (jumlah regresor) dan $\alpha = 5\%$, jika nilai $OBS \cdot R^2 < \chi^2$ maka

tidak signifikan secara statistik. Berarti hipotesa yang menyatakan bahwa model empirik tidak terdapat masalah heteroskedastisitas tidak ditolak (Siti Aisyah Tri Rahayu, 2007:105). Berikut adalah hasil uji LM ARCH:

Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas

ARCH Test:

F-statistic	0.078336	Probability	0.784332
Obs*R-squared	0.090799	Probability	0.763164

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/04/10 Time: 22:52

Sample(adjusted): 1994 2007

Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.012344	0.006524	1.892119	0.0828
RESID^2(-1)	-0.068927	0.246270	-0.279885	0.7843
R-squared	0.006486	Mean dependent var		0.011386
Adjusted R-squared	-0.076307	S.D. dependent var		0.020033
S.E. of regression	0.020784	Akaike info criterion		-4.777724
Sum squared resid	0.005184	Schwarz criterion		-4.686430
Log likelihood	35.44407	F-statistic		0.078336
Durbin-Watson stat	1.768988	Prob(F-statistic)		0.784332

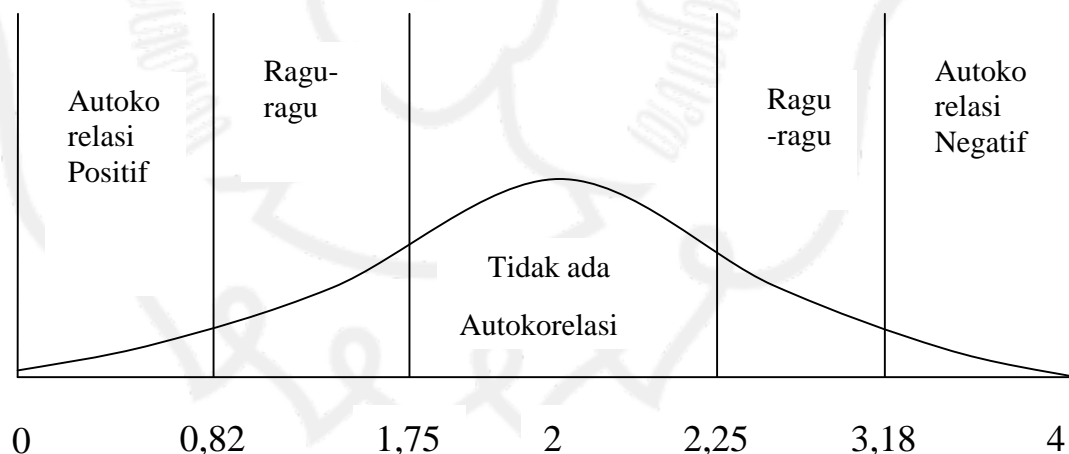
Sumber : Hasil pengolahan komputer, Eviews 3.0

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh hasil χ^2 (df = 1, $\alpha = 5\%$) = 3,841, sedangkan $OBS \cdot R^2$ sebesar 0.090799 sehingga apabila dibandingkan maka $OBS \cdot R^2$ lebih kecil dari pada χ^2 . dapat disimpulkan bahwa pada model ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di antara anggota dari serangkaian observasi yang terletak berderetan secara series dalam waktu (untuk data *time series*) atau korelasi antara tempat yang berdekatan (untuk data *cross sectional*). Untuk menguji adanya pengaruh autokorelasi dalam penelitian ini digunakan metode *Durbin-Watson*.

Berdasarkan hasil dari regresi linear berganda diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,77. Pada tabel statistik dengan $\alpha = 5\%$ dan $n=15$ diperoleh nilai $d_L = 0,82$; $d_U = 1,75$; $4-d_U = 2,25$; $4-d_L = 3,18$. Dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.3 Statistik d (Durbin-Watson) Uji Autokorelasi

Nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,77 terletak di sebelah kanan d_U , hal ini berarti bahwa hasil pengujian menunjukkan tidak ada autokorelasi.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, dapat juga dihitung menggunakan B-G Test, yaitu jika nilai probabilitas variabel independen lebih besar dari $\alpha = 5\%$ maka hipotesa yang menyatakan pada model tidak terdapat autokorelasi tidak ditolak. Berarti model empirik lolos dari masalah autokorelasi.

Tabel 4.14 Hasil B-G Test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.162565	Probability	0.695292
Obs*R-squared	0.239947	Probability	0.624245

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/04/10 Time: 23:03

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.293320	1.081654	0.271178	0.7918
LOG(X)	-0.298450	0.919366	-0.324626	0.7522
LOG(I)	0.017740	0.127068	0.139612	0.8917
LOG(G)	0.074514	0.241924	0.308007	0.7644
RESID(-1)	-0.232938	0.577733	-0.403193	0.6953
R-squared	0.015996	Mean dependent var		6.62E-16
Adjusted R-squared	-0.377605	S.D. dependent var		0.124423
S.E. of regression	0.146037	Akaike info criterion		-0.748705
Sum squared resid	0.213269	Schwarz criterion		-0.512688
Log likelihood	10.61529	F-statistic		0.040641
Durbin-Watson stat	1.495834	Prob(F-statistic)		0.996323

Sumber : Hasil pengolahan komputer, Eviews 3.0

Dari hasil regresi di atas dapat ditunjukkan bahwa probabilitas untuk semua variabel independen lebih besar dari $\alpha = 5\%$, sehingga dapat dipastikan bahwa pada model ini tidak terjadi autokorelasi.

2. Interpretasi Ekonomi

a. Koefisien β_0

Berdasarkan persamaan regresi diatas, di dapat nilai konstanta sebesar 7,065. Ini berarti bahwa jika ekspor, investasi, dan pengeluaran pemerintah pada periode sebelumnya sama dengan nol, maka besarnya penyerapan tenaga kerja sama dengan konstantanya yaitu sebesar 7,065, karena penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sragen tidak hanya dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut.

b. Pengaruh Ekspor terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

Dari hasil yang diperoleh, nilai koefisien regresi dari variabel pengeluaran pemerintah ekspor sebesar -1,379, dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya ekspor berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, yang artinya bahwa jika ekspor naik sebesar 1% maka jumlah tenaga kerja akan turun sebesar 1,379% dengan tingkat signifikansi 0,05.

c. Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Investasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan bahwa variabel investasi tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%.

d. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

Berdasarkan perhitungan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Ini bisa diketahui dengan tidak signifikannya variabel pengeluaran pemerintah pada tingkat signifikansi 5%.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang penyerapan tenaga kerja tahun 1993 – 2007 di Kabupaten Sragen, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Ekspor

Ekspor daerah Sragen berpengaruh secara negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sragen. Bila ekspor daerah naik, justru menurunkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sragen, dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan perusahaan – perusahaan furniture di Kabupaten Sragen yang mengekspor produknya ke luar negeri sebagian besar menggunakan padat modal, yakni perusahaan – perusahaan tersebut lebih banyak menggunakan peralatan mesin modern untuk memproduksi barang. Sehingga tidak memerlukan tenaga manusia yang banyak. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi ekspor, maka belum tentu kesempatan kerja juga ikut naik. Semakin besar ekspor maka tidak menambah jumlah tenaga kerja yang terserap.

2. Variabel Investasi

Investasi daerah Sragen tidak terbukti mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sragen. Jadi banyak atau sedikitnya

investasi yang tertanam di Kabupaten Sragen tidak mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang terserap.

3. Variabel Pengeluaran Pemerintah

Variabel pengeluaran pemerintah daerah Sragen tidak terbukti berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sragen. Sehingga sebanyak apapun pengeluaran pemerintah yang dilakukan di Kabupaten Sragen tidak akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.

B. Saran

1. Agar penyerapan tenaga kerja di kabupaten Sragen mengalami kenaikan, maka yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen adalah mengeluarkan kebijakan atau peraturan baru kepada perusahaan furniture untuk lebih menambah jumlah tenaga kerja yang mereka gunakan tanpa harus meninggalkan atau membuang peralatan mesin yang selama ini mereka pakai. Dengan demikian ekspor daerah Sragen akan naik dan akan menambah jumlah tenaga kerja yang terserap.
2. Diduga investasi daerah dan pengeluaran pemerintah daerah Sragen tidak digunakan untuk membangun proyek yang menyerap tenaga kerja. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk meneliti apakah ada kebocoran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Sragen dan tidak digunakan secara semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, MS. 2004. *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*. Penerbit PPM. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 1993. *Sragen Dalam Angka 1993*. Sragen
- Badan Pusat Statistik. 1996. *Sragen Dalam Angka 1996*. Sragen
- Badan Pusat Statistik. 1999. *Sragen Dalam Angka 1999*. Sragen
- Badan Pusat Statistik. 2002. *Sragen Dalam Angka 2002*. Sragen
- Badan Pusat Statistik. 2005. *Sragen Dalam Angka 2005*. Sragen
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Sragen Dalam Angka 2007*. Sragen
- Damodar Gujarati. 1997. *Ekonometrika Dasar*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Erna Setianingrum. 2008. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Karanganyar Tahun 1991 – 2006. *Skripsi* FE-UNS. Surakarta.
- Irawan & M.Suparmoko. 1992. *Ekonomika Pembangunan Edisi 5*. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Lincoln, Arsyad. 1999. *Pengantar dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE-UGM. Yogyakarta.
- Mulyadi, S. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Payaman Simanjuntak. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sadono Sukirno. 1995. *Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siti Aisyah Tri Rahayu. 2007. *Modul Laboratorium Ekonometrika*. FE-UNS. Surakarta.

Suroto. 1983. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 2003. CV Mini Jaya Abadi. Jakarta

